

## **DAMPAK BREXIT TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INGGRIS-IRLANDIA**

**Oleh: Fajar Mahardika**

([fajarmahardika.ipdn@gmail.com](mailto:fajarmahardika.ipdn@gmail.com))

**Dosen Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si**

**Bibliografi: 14 Jurnal, 19 Buku, 9 Dokumen Resmi, 30 Website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

### **ABSTRACT**

*This study explains the impact of Britain's exit from the European Union on British and Irish relations. Britain's exit from the European Union is known as Brexit. On June 23, 2016 the United Kingdom conducted a referendum which resulted in Britain leaving the European Union. After the British exit from the European Union, the UK adopted a policy of increasing security in the border area, which generated negative reactions from Ireland. So that British policy has a negative impact on relations between the two countries.*

*This study uses the perspective of Neorealism in international relations and the level of analysis of the Nation State is supported by Foreign Policy Theory and this study uses the Concept of National Interest. This research is a qualitative research with a documentary study research method. The scope of research is during PM Theresa May.*

*This study shows that the impact of Brexit on Britain and Ireland is that the UK violated an agreement with Ireland on the border and the policy received a negative response. As a result of the border also reduced the interest of tourists from the UK to Ireland and the UK also adopted a policy of imposing an increase in import export tariffs after leaving the European Union.*

**Keywords: Brexit, United Kingdom, Ireland, Impact, Bilateral Relations**

## Pendahuluan

Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973, namun Inggris tidak sepenuhnya mantap menjadi anggota tetap UE, dengan menolak memakai mata uang Euro dan tetap memakai mata uang Poundsterling. Pada 5 Juni 1975 Inggris sempat melakukan Referendum apakah Inggris masih mau tetap di Eropa atau tidak, 67,2% masyarakat Inggris memilih untuk tetap berada di Uni Eropa.<sup>1</sup>

Pada 23 Juni 2016 Inggris kembali melakukan Referendum, Komisi Pemilu (*Electoral Commision*) adalah badan di Inggris yang bertugas menjalankan pelaksanaan referendum tersebut. Komisi pemilu dipimpin oleh seorang Kepala Petugas Penghitungan/KPP(*Chief Counting Officer/CCO*) Komisi pemilu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi dan regulasi referendum berdasarkan rancangan dari *Political Parties, Elections, and Referendums Act 2000* (PPERA). 51,9% (17.410.742 orang) ingin Inggris meninggalkan Uni Eropa selama referendum diadakan, dan 48,1% (16.141.241 orang) ingin Inggris tetap di Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan pada saat itu bahwa hasil referendum adalah hasil akhir yang mutlak.<sup>2</sup>

*Brexit* ini berimplikasi terhadap banyak hal. Tidak hanya isu tentang

ekonomi, politik, keamanan, serta sektor- sektor yang lain, salah satu isu yang wajib melewati perdebatan alot serta yang hendak jadi fokus bahasan dari tulisan ini merupakan isu menimpa perbatasan antara Irlandia serta Irlandia Utara yang masuk ke dalam daerah Inggris.<sup>3</sup> Sesudah Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa, Irlandia Utara tidak akan jadi bagian dari Uni Eropa lagi. Walaupun kedua belah pihak sepakat tidak akan terdapat infrastruktur fisik yang bakal dibangun untuk memisahkan kedua daerah, tetapi Inggris senantiasa mau mengendalikan orang- orang serta beberapa barang yang melewati perbatasan.

Perbatasan serta pengecekan di antara kedua daerah tersebut telah dihapuskan semenjak 1998 dalam suatu perjanjian Inggris serta Irlandia yang dinamakan perjanjian Good Friday. Sebelumnya berlangsung konflik antara Inggris serta Irlandia yang menimbulkan tewasnya kurang lebih 3.500 orang.<sup>4</sup> Adanya perbatasan bisa menimbulkan kembali konflik oleh orang- orang yang belum dapat menerima perdamaian yang diusulkan.

Uni Eropa menginginkan perbatasan antara Irlandia serta Irlandia Utara senantiasa bisa terbuka pada saat Inggris telah meninggalkan Uni Eropa. Warga serta pelaku bisnis yang terdapat dalam radius 500 km dari perbatasan Irlandia serta Irlandia Utara serta menekankan betapa berartinya mempertahankan arus bebas perdagangan serta masuk keluarnya

---

<sup>1</sup> "Sejarah Panjang Keengganannya Inggris di Uni Eropa", Berita Satu (Jnuari 2013)

<https://www.beritasatu.com/dunia/93328-sejarah-panjang-keengganannya-inggris-di-uni-eropa.html> , (diakses pada 19 Februari 2019)

<sup>2</sup> "EU Referendum Result", BBC, [http://www.bbc.com/news/politics/eu\\_referendum/result](http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/result), (diakses pada 12 November 2019)

---

<sup>3</sup> Anthony Gordon, "Brexit and The Irish Border: Legal and Political question", British Academy (2017): 4

<sup>4</sup> *Ibid*

orang-orang. Paling tidak terdapat 30.000 orang yang melewati perbatasan ini tiap harinya untuk bekerja. Mereka tinggal di satu sisi Irlandia serta bekerja di sisi yang lain.<sup>5</sup>

### **Kerangka Teori Dasar**

Perspektif penulis dalam penelitian ini merupakan neorealisme. Pemikiran neo-realistis berupaya menyempurnakan realisme klasik dengan mengembalikan negara ke struktur yang bernilai.<sup>6</sup> Pada bukunya yang berjudul “*Theory of Internasional Politics*”, Kenneth N. Waltz melahirkan suatu pemikiran Neorealisme pada tahun 1979. Waltz memfokuskan teori hubungan internasional pada struktur sistem, unit-unit yang berhubungan, kontinuitas sistem serta transisi. Dari sudut pandang neorealistis, struktur hubungan internasional yakni berguna sebab menggambarkan struktur yang memastikan sikap negara dalam menggapai kepentingan nasionalnya.<sup>7</sup>

Teori yang penulis gunakan di sini adalah teori kebijakan luar negeri (*foreign policy*), kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana aksi yang dibuat oleh pembuat keputusan nega-

ra dalam berurusan dengan negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dimonitor untuk pencapaian kepentingan nasional.<sup>8</sup> Bagaimanapun, kebijakan luar negeri suatu negara mengejar kepentingan nasional orang-orang yang dikelolanya, meskipun kepentingan nasional suatu negara sebenarnya ditentukan oleh siapa yang berkuasa.<sup>9</sup> Negara dan pelaku dari negara-negara ini berpartisipasi dalam berbagai bentuk kerja sama untuk membela kepentingan nasional mereka, termasuk kerja sama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Menurut Rosenau, konsep kebijakan luar negeri adalah upaya suatu bangsa untuk menaklukkan dan mengambil keuntungan dari lingkungan luarnya melalui sikap dan aktivitas umumnya. Kebijakan luar negeri adalah tentang menjaga stabilitas suatu negara.<sup>10</sup>

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, konsep Kepentingan Nasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan kebutuhan bangsa / negara atau dalam kaitannya dengan tujuan yang dikejar. Kepentingan nasional meliputi, dalam hal apa pun, integritas teritorial, kemandirian dan kelangsungan hidup nasional suatu negara. Kelangsungan hidup nasional itu sendiri memiliki interpretasi yang berbeda dari negara

---

<sup>5</sup> “Perbatasan Irlandia-Inggris Menjadi Isu Utama Brexit”, Kumparan (Oktober 2018), <https://kumparan.com/@kumparannews/perbatasan-irlandia-inggris-menjadi-isu-utama-brexit-1539865101738390754>, (diakses pada tanggal 19 Februari 2019)

<sup>6</sup> Iva Rachmawati, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)

<sup>7</sup> Baiq Wardhani, *Neoliberalisme dan Neorealisme* (materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional), Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga (2014)

---

<sup>8</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Abaridin, 1999), hlm 5

<sup>9</sup> Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994) Hlm 10.

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 32

yang berbeda dengan keadaan yang berbeda.<sup>11</sup>

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai tolok ukur atau kriteria dasar bagi para pembuat keputusan di setiap negara sebelum merumuskan dan mendefinisikan sikap atau tindakan. Bagaimanapun, setiap langkah dalam kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional dan harus ditujukan untuk menjangkau dan melindungi mereka yang dikategorikan atau didefinisikan sebagai "kepentingan nasional".<sup>12</sup>

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya ada 5 kategori umum yaitu<sup>13</sup>:

1. *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri, tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara memiliki power besar tidak melakukan dan merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan

---

<sup>11</sup> Arnold Wolfers, dalam James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzzgraff Jr, *Contending Theories in International Relations*, (New York: JB. Lippincot Co, 1971), hlm 62

<sup>12</sup> T. May Rudy, *Studi strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2002), hlm 116

<sup>13</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *"The International Politic Dictionary"*, Third Edition, (Western Michigan University-California: ABC Clio Publisher 1982), hlm 27

diri (*Self Preservation*) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lain sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

2. *Independence*, yang berarti kemerdekaan, kedaulatan suatu negara untuk mengatur rumah tangga domestik dan asing secara militer dan ekonomi tanpa campur tangan dan tunduk kepada negara lain berupaya mendapatkan kekuasaan dengan bekerja sama dengan negara lain sehingga negara tersebut tidak dijajah atau tunduk pada negara lain.
3. *Military Security*, Keamanan suatu negara dinilai oleh kekuatan militer untuk mempertahankan atau melindungi keamanan teritorial dari kekuatan militer negara lain, dengan tujuan melindungi negara dari pasukan negara lain atau terhadap campur tangan militer dari negara lain.
4. *Territory Integrity*, yaitu Kepentingan nasional dalam mengamankan wilayah teritorial dan sumber dayanya di dalam wilayah suatu negara adalah untuk memenuhi kebutuhan akan suatu wilayah yang dianggap strategis dan menguntungkan.
5. *Economic Well being*, Tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran ekonomi

nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tingkatan analisa yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian tingkat negara. Bagi Kenneth N. Waltz, penelitian tingkatan negara merupakan elemen penjelas. Tingkatan analisis ini menolong penulis mengenali variabel yang hendak memastikan perilaku aktor. Bagi Waltz, terdapat 3 analisis. Sistem( system-level analyse) merupakan tingkat awal. Tingkatan analisis ini dianggap sebagai tingkatan analisis yang sangat merata sebab bisa memberikan pola universal aksi negara serta saling ketergantungan di antara mereka, tingkatan analisis sistem akan memperhitungkan struktur sistem internasional serta bagaimana hal itu pengaruhi para aktor.<sup>14</sup>

Jenis analisis kedua adalah negara (*state-level analyse*), di mana faktor-faktor internal negara menentukan tindakan negara. Pengakuan akan perlunya aktor yang berbeda (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di negara itu memainkan peran dalam pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan tingkat studi negara.. Tingkat analisis terakhir adalah tingkat individu. Tingkat pemahaman individu memandang individu sebagai aktor. Tingkat analisis ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok atau bagaimana faktor-faktor aneh mempengaruhi pembuatan

---

<sup>14</sup> Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional". Jurnal Transnasional, Vol.5 NO. 1, (2013): 899

kebijakan luar negeri.<sup>15</sup>Oleh karena itu, dalam klarifikasi ini, tingkat analisis negara ideal untuk penulis, tergantung pada tingkat analisis yang difokuskan pada apa yang dilakukan negara dan apakah berdampak pada negara lain.

## Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis berfokus terhadap dampak yang dihasilkan Inggris yang keluar dari Uni Eropa yang dikenal dengan istilah *Brexit*. Penulis memaparkan beberapa dampak dari *Brexit* terhadap hubungan bilateral Inggris dan Irlandia pada bidang keamanan dan ekonomi.

### 1. Keamanan

#### Kebijakan Peningkatan Keamanan di Wilayah Perbatasan Inggris-Irlandia

Pada saat Inggris bergabung dengan Uni Eropa maka secara paksa Inggris diwajibkan membuka pintu guna menampung para imigran sebagai dampak dari adanya kebijakan *Open Border Policy* yang dibuat oleh Uni Eropa, keenam negara peneri Uni Eropa yaitu: Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman kemudian membuat aturan-aturan untuk memfasilitasi imigran yang berasal dari warga negara sesamanya,<sup>16</sup> aturan tersebut berada dibawah ketentuan *free movement of persons* (pergerakan bebas orang). Pada tahun 1957, kebijakan mengenai *free movement persons* menjadi salah satu syarat pemben-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 899

<sup>16</sup> Ivana Kattasova, "The Fact About Brexit and Immigration", CNN Business, <https://money.cnn.com/2016/06/21/news/economy/brexit-eu-referendum-immigration-facts/index.html>, (diakses pada tanggal 10 Februari)

tukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yang merupakan cikal-bakal Uni Eropa dan dimuat dalam *Treaty of Rome*.

Kebijakan *free movement of persons* yang berlaku saat ini dimuat dalam *Lisbon Treaty*<sup>17</sup> yang menjamin konsep kewarganegaraan Uni Eropa, yaitu adanya hak warga negara anggota untuk bergerak atau berpindah dan bebas berada di dalam wilayah negara anggota Uni Eropa, karena setiap pemegang kewarganegaraan dari salah satu negara anggota Uni Eropa secara otomatis juga menjadi warga negara Uni Eropa. Perjanjian Lisbon menegaskan hak ini dalam ketentuan umum *TITLE V Area of Freedom, Security, and Justice, The Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU).<sup>18</sup>

Kebijakan *free movement of persons* menjamin hak-hak kebebasan bergerak bagi warga negara berdasarkan prinsip non-diskriminasi atas dasar kebangsaan yang berkaitan dengan *free movement of persons* juga diatur dalam TFEU diantaranya: Pasal 20 dan 21 TFEU, Pasal 45-48 TFEU, Pasal 49-53 TFEU.<sup>19</sup>

Dari kebijakan tersebut, terdapat beberapa kasus kejahatan yang terjadi diperbatasan Inggris-Irlandia. Pada Juni 2008, hasil investigasi gabungan dari Polisi Irlandia Utara dan Petugas Biro Imigrasi, seorang pria warga Irlandia Utara didakwa dengan tuduhan memfasilitasi imigran

gelap masuk ke Republik Irlandia dan diadili di pengadilan Irlandia Utara.<sup>20</sup> Pada September 2008 ada delapan tersangka ditangkap (3 orang Irlandia, 1 orang Irlandia Utara dan 4 orang Belanda) hasil dari penangkapan tersebut: Disita 20 senjata api, 6 peredam suara senajut api, 5 kg ganja herbal dan heroin diperkirakan bernilai 3,25 juta Pounsterling atau 4,1 juta Euro ditemukan di perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara.<sup>21</sup>

Melihat dari sudut pandang masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dampak dari *Brexit* tersebut signifikan terhadap mereka, banyak yang menyebutkan permasalahan Inggris-Irlandia yang lebih luas, seperti perubahan yang mengharuskan adanya paspor ketika bepergian dari Inggris ke Irlandia, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, pelestarian wilayah perjalanan bersamanya menjadi sangat penting bagi orang-orang yang tinggal di wilayah perbatasan yang terkena efek *Brexit*. Perjalanan penyeberangan lintas batas dalam 'kehidupan sehari-hari' sangat jelas, bepergian untuk belanja, olahraga, liburan, hiburan, dan bisnis.<sup>22</sup>

Alasan orang-orang yang melewati perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara sebab utamanya adalah alasan sosial (52%) seperti bertemu keluarga dan teman, berbelanja (45%). Ini diikuti oleh 40% orang untuk bekerja atau bisnis dan sekitar 38% untuk olahraga atau liburan. Setid-

<sup>17</sup> European Union, "The Treaty of Lisbon: introduction", (diakses pada 10 Februari 2020)

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> George Allison, "Study Finds UK is second most powerful country in the world, *UK Defence Journal* (2014): 12

<sup>20</sup> Cross Border Organised Crime, "Assessment 2014", (2014): 13

<sup>21</sup> Cross Border Organised Crime Assessment (2008): 8

<sup>22</sup> Katy Hayward, *Op Ci* hal. 61

aknya alasan umum orang-orang yang menyebrangi perbatasan untuk sekolah (9%) dan untuk melakukan penyebrangan dengan alasan fasilitas kesehatan (10,5%).<sup>23</sup>

Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan berfikir bahwa pasar mereka akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan *Brexit* tentang adanya peningkatan pengawasan di perbatasan, yaitu tentang belanja lintas batas, perjalanan, perdagangan, dan koneksi sosial. Perbatasan akan memutuskan jaringan transportasi utama, akses belanja dan akses pekerjaan.<sup>24</sup>

### **Pelanggaran Perjanjian *Good Friday***

Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, Inggris mengambil kebijakan meningkatkan keamanan di daerah perbatasan di wilayah Irlandia dan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari negara Inggris. Sementara kedua belah pihak memutuskan tidak akan ada hambatan fisik untuk membagi kedua negara, Inggris juga ingin melacak orang dan barang yang melintasi perbatasan. Ini bisa menjadi masalah karena orang-orang Irlandia Utara merasa seperti bagian yang berbeda dari Inggris, tetapi juga merasa menyatu dengan Irlandia. Sehingga pemisahan kedua wilayah akan menjadi sulit. Perbatasan dan pengecekan di wilayah tersebut sudah dihapus semenjak adanya perjanjian *Good Friday*. Perjanjian yang dilanggar oleh Inggris menyangkut tentang point keamanan pada perjanjian *Good Friday*. Yaitu terdapat pada pasal 2 ayat 2 yaitu

“Penghapusan Penghapusan Instalasi Keamanan”.<sup>25</sup>

*Good Friday Agreement* ditandatangani pada 10 April 1998. Perjanjian ini muncul setelah sekitar lima bulan negosiasi oleh semua pihak. *Good Friday Agreement* lebih jelas dalam hal konten. Kedua belah pihak harus mendukung perjanjian ini karena dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing kelompok, yaitu penentuan nasib sendiri, pengakuan identitas dan kerjasama antar pulau. Kondisi yang paling penting untuk suatu perjanjian substantif adalah perjanjian yang dapat mewakili kepentingan semua pihak, yaitu realisasi rekonsiliasi yang terdiri dari semua pemangku kepentingan.<sup>26</sup>

Setelah perjanjian ditandatangani. Kesepakatan yang pertama menyangkut distribusi porsi yang sama dalam pemerintahan Irlandia Utara. Pemerintahan bersama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses perdamaian di Irlandia Utara, karena akan menghilangkan kekhawatiran kedua belah pihak. Nasionalis tidak lagi khawatir tentang diskriminasi dalam pembuatan kebijakan ketika mereka merasa tidak proporsional dengan perjanjian ini karena anggota serikat mengisi sebagian besar anggota parlemen. Hal yang sama berlaku untuk unions, yang awalnya takut dipinggirkan ketika Irlandia Utara memasuki Republik Irlandia dan akhirnya menjadi minoritas yang kepentingannya akan kurang dipertimbangkan oleh pemerintah.

---

<sup>25</sup> The Belfast Agreement, Northern Ireland Office (1998)

<sup>26</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Op Cit* Hal. 49

---

<sup>23</sup> *Ibid* hal. 48

<sup>24</sup> *Ibid* hal. 62

Adanya perbatasan kembali menyebabkan Inggris melanggar perjanjian *Good Friday* antara Inggris dan Irlandia yang mana perbatasan tersebut sudah dihapuskan semenjak perjanjian itu disepakati. Walaupun tidak ada pembangunan secara fisik, perbatasan tersebut dapat menyebabkan konflik Inggris dan Irlandia yang pernah terjadi yang menyebabkan orang tewas sebanyak 3.500 jiwa.<sup>27</sup>

## 2. Ekonomi

### Industri Pariwisata

Rancangan program dari Eksekutif Irlandia Utara untuk kerangka kerja pemerintah 2016 hingga 2021 bertujuan untuk "meningkatkan daya tarik Irlandia Utara sebagai tujuan wisata". Kemajuan indikator ini diukur dengan total pengeluaran pengunjung dari luar. Demikian pula, program pemerintah Republik Irlandia mencakup tujuan kebijakan untuk tahun 2025 untuk meningkatkan pendapatan pengunjung asing hingga € 5 miliar, sehingga meningkatkan lapangan kerja di sektor pariwisata tumbuh menjadi 250.000 dari 200.000 dan meningkatkan jumlah kunjungan ke Republik Irlandia menjadi 10 juta.<sup>28</sup> Sebagai perbandingan: Pada tahun 2015, 28% dari keseluruhan pendapatan eksternal (total perjalanan:

---

<sup>27</sup>Kumparan, *Op Cit*

<sup>28</sup>A Programme for a Partnership Government, Dublin: Irish Government (2016), [http://www.merrionstreet.ie/merrionstreet/en/imageli-library/programme\\_for\\_partnership\\_government.pdf](http://www.merrionstreet.ie/merrionstreet/en/imageli-library/programme_for_partnership_government.pdf). (diakses pada tanggal 11 februari 2020)

2.284.889) ke Irlandia Utara di dominasi oleh pengunjung dari Republik Irlandia dan daratan Eropa, 57% dari pendapatan eksternal di dominasi oleh pengunjung dari Inggris, sedangkan 16% didominasi oleh pengunjung dari seluruh dunia. Jika pengunjung dari Britania Raya dikecualikan (jumlah total perjalanan, tidak termasuk Inggris: 989.470), 64% dari keseluruhan perjalanan tersebut di luar negara bagian di dominasi oleh pengunjung dari Republik Irlandia dan daratan Eropa, dibandingkan dengan 36% yang dilakukan oleh pengunjung dari seluruh dunia.<sup>29</sup>

Sebagai perbandingan: 40% dari keseluruhan perjalanan (dari 7,749.000) ke Republik Irlandia pada 2015 berasal dari Inggris, 37% dari seluruh Eropa, 16% dari AS dan Kanada dan 6% dari semua daerah lain. Secara keseluruhan, 14% pengunjung dari pulau Irlandia pada 2015 datang ke Irlandia Utara dan 76% ke Republik Irlandia. Sejak pemilihan *Brexit*, Euro telah menguat secara signifikan terhadap Pounds Inggris menjadikan Irlandia tujuan yang lebih mahal dan pengunjung Inggris turun menjadi 3,7 juta pada tahun 2017.<sup>30</sup>

Referendum Inggris memiliki dampak terhadap pariwisata di Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Untuk Irlandia Utara, efek langsungnya adalah bahwa penurunan nilai ponsterling dapat berfungsi untuk membuat liburan di Irlandia Utara

---

<sup>29</sup>External Overnight Trips to Northern Ireland additional tables, Department for the Economy, (2016) <https://www.economy-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/economy/External-Overnight-Trips-2015-Tables-for-Online.xlsx>, (diakses pada 11 Februari 2020)

<sup>30</sup> Crowe, *Op Cit*

lebih menarik bagi pengunjung dari luar Inggris. Selain itu, dengan membuat liburan di luar Inggris lebih mahal bagi wisatawan dari Irlandia Utara, penurunan nilai pounsterling juga dapat mempromosikan pariwisata domestik.<sup>31</sup>

### **Penyusunan Chequers Plan**

Republik Irlandia adalah pasar penting untuk produk-produk dari Irlandia Utara. Pada 2015, 33% dari semua ekspor barang dari Irlandia Utara ke Republik Irlandia, menyumbang 61% dari ekspor Uni Eropa dari Irlandia Utara pada tahun yang sama.<sup>32</sup>

Inggris merupakan sumber 25,7% dari impor Irlandia pada tahun 2015. Oleh karena itu, dari perspektif perdagangan keseluruhan, Republik Irlandia ini pasar perdagangan yang lebih penting untuk Irlandia Utara, daripada Irlandia Utara untuk Republik Irlandia, baik dalam hal ekspor maupun impor.<sup>33</sup>

Dampak *Brexit* pada ekonomi Irlandia kemungkinan akan lebih dirasakan pada sisi impor dengan angka-angka yang menunjukkan bahwa Inggris adalah pasar impor terbesar Republik Irlandia pada tahun 2017. Angka-angka, tersebut diterbitkan oleh *Central Statistics Office* (CSO), menunjukkan bahwa Inggris menyumbang 24% atau € 19 miliar berupa makanan, bahan bakar dan barang-barang lainnya yang diimpor ke negara

bagian tahun lalu. Ini hampir € 3 miliar lebih dari nilai ekspor Irlandia ke Inggris. Impor makanan dan minuman dari Inggris adalah kategori terbesar, terhitung € 4 miliar dari total, sementara impor mesin dan alat transportasi berjumlah € 3,2 miliar. Impor produk minyak bumi dari Inggris bernilai € 2,7 miliar, sedangkan impor produk medis dan farmasi berjumlah € 3,1 miliar.

Dari sisi tarif ekspor impor, Inggris bukan lagi bagian dari Uni Eropa sehingga fasilitas *Free Trade Area* (FTA) yang didapatkan Inggris sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa tidak berlaku lagi, karena hal tersebut Inggris dan Irlandia harus membayar tarif ekspor impor yang mencapai hingga 200%, hal tersebut dirasa terlalu memberatkan para pengusaha Inggris dan Irlandia.

Oleh sebab itu, PM Inggris pada saat itu Theresa May mengambil tanggung jawab untuk memandu kepergian Inggris dari Uni Eropa dalam rancangan yang disebut "*Chequers Plan*". *Chequers Plan* merupakan buah dari upaya PM Theresa May untuk menggabungkan ide-ide pokok kelompok pro-brexit dan kelompok anti-brexit. *Chequers Plan* disusun di *Chequers Court*, rumah dinas resmi Perdana Menteri yang berlokasi di Buckinghamshire, Inggris.<sup>34</sup>

### **Kesimpulan**

---

<sup>31</sup>Economist Richard Ramsey on the 10 ways Brexit will impact us, *The Belfast Telegraph*, (2016) <http://www.irishnews.com/business/2016/06/24/news/economist-richard-ramsey-on-10-ways-Brexit-will-impact-on-us-578502/>, (diakses pada tanggal 11 Februari)

<sup>32</sup>HMRC UK Trade Info, *Op Cit*

<sup>33</sup>Central Statistics Office, *Op Cit*

---

<sup>34</sup> Memahami Chequers Plan, Backstop Plan, dan Kekalutan Brexit Terkini, *Seputar Forex* (23 Oktober 2018), <https://www.seputarforex.com/berita/memahami-chequers-plan-backstop-plan-dan-kekalutan-brexit-terkini-285848-12>, (diakses pada tanggal 12 Februari 2020)

Terdapat beberapa Implikasi terhadap terjadinya *Brexit* diantaranya yaitu, Pertama Inggris melakukan pengambilan kebijakan meningkatkan keamanan di daerah perbatasan termasuk di daerah perbatasan Inggris dan Irlandia. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah terhadap hubungan Bilateral kedua Negara tersebut. Kedua, Inggris melanggar perjanjian *Good Friday* pada point tentang keamanan pada pasal 2 ayat 2 tentang penghapusan instalasi keamanan di perbatasan. Perjanjian *Good Friday* dibuat akibat sebelumnya terjadi konflik antara Inggris dan Irlandia yang menyebabkan tewasnya sekitar 3.500 orang. Ketiga, melemahnya industri pariwisata dan menurunnya nilai tukar poundsterling terhadap eruo menyebabkan menurunnya wisatawan dari Inggris ke Irlandia. Keempat, Inggris merancang *Cheequers Plan* setelah Inggris keluar dari Uni Eropa yang mana Inggris menerapkan tarif pada sektor ekspor impor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allison, George”Study Finds UK is second most powerfull country in the world, *UK Defence Journal* (2014): 12
- Gordon, Anthony,” *Brexit and The Irish Border: Legal and Political question*”, British Academy (2017): 4
- Jack C. Plano and Roy Olton, “*The International PoliticDictionary*”, Third Edition, Western Michigan University-California: ABC Clio Publisher 1982
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Abaridin, 1999
- Mas’oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.1994
- Olivia, Yessi, “*Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*”. *Jurnnal Transnasional*, Vol.5 NO. 1, (2013): 899
- Rachmawati, Iva, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Rudy, T. May, *Studi strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: PT. Refika Aditama 2002
- Wardhani, Baiq *Neoliberalisme dan Neorealisme* (matei disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional), Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga 2014)
- Wolfers, Arnold, dalam James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzzgraff Jr, *Contending Theories in International Relations*, New York: JB. Lippincot Co, 1971
- Cross Border Organised Crime Assessment (2008): 8
- A Programme for a Partnership Government, Dublin: Irish Government (2016), [http://www.merriestreet.ie/merriestreet/en/imagelibrary/programme\\_for\\_partnership\\_government.pdf](http://www.merriestreet.ie/merriestreet/en/imagelibrary/programme_for_partnership_government.pdf).(diakses pada tanggal 11 februari 2020)
- Economist Richard Ramsey on the 10 ways Brexit will impact us, *The Belfast Telegraph*, (2016) <http://www.irishne>

- ws.com/business/2016/06/24/news/economist-richard-ramsey-on-10-ways-Brexit-will-impact-on-us-578502/, (diakses pada tanggal 11 Februari)
- EU Referendum Result, BBC, [http://www.bbc.com/news/politics/eu\\_referendum/result](http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/result), (diakses pada 12 November 2019)
- European Union, “*The Treaty of Lisbon: introduction*”,(diakses pada 10 Februari 2020)
- External Overnight Trips to Northern Ireland additional tables, Department for the Economy, (2016) <https://www.economy-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/economy/External-Overnight-Trips-2015-Tables-for-Online.xlsx> , (diakses pada 11 Februari 2020)
- Ivana Kattasova, “*The Fact About Brexit and Immigration*”, CNN Business, <https://money.cnn.com/2016/06/21/news/economy/brexit-eu-referendum-immigration-facts/index.html>, (diakses pada tanggal 10 Februari)
- Memahami Chequers Plan, Backstop Plan, dan Kekalutan Brexit Terkini, Seputar Forex (23 Oktober 2018), <https://www.seputarforex.com/berita/memahami-chequers-plan-backstop-plan-dan-kekalutan-brexit-terkini-285848-12>, (diakses pada tanggal 12 Februari 2020)
- Perbatasan Irlandia-Inggris Menjadi Isu Utama Brexit, Kumparan (Oktober 2018), <https://kumparan.com/@kumparanews/perbatasan-irlandia-inggris-menjadi-isu-utama-brexit-1539865101738390754> , (diakses pada tanggal 19 Februari 2019)
- Sejarah Panjang Keengganan Inggris di Uni Eropa, Berita Satu (Januari 2013) <https://www.beritasatu.com/dunia/93328-sejarah-panjang-keengganan-inggris-di-uni-eropa.html> , (diakses pada 19 Februari 2019)